



## 2016, Gianyar Rancang 857 Kegiatan Pembangunan



• NUSABALI/WILASA

Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata memukul gong menandai pembukaan Musrenbangda Tahun 2015 di Ruang Sidang I Pemkab Gianyar, Selasa (24/3).

GIANYAR, NusaBali

Pemkab Gianyar merancang 867 kegiatan pembangunan untuk 2016 dengan nilai usulan Rp 561,949 miliar. Angka ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 di Gianyar, Selasa (24/3).

Kegiatan tersebut dibagi menjadi 4 bidang yakni 200 kegiatan di bidang aparatur dan pemerintahan dengan plafon dana Rp 63,935 miliar. Bidang ekonomi 200 kegiatan dengan Rp 70,396 miliar. Bidang Infrastruktur 133 kegiatan dengan Rp 245,945 miliar. Sedangkan bidang kesejahteraan masyarakat 181,674 miliar akan direncanakan untuk 324 kegiatan.

Kepala Bappeda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan Musrenbang RKPD merupakan penyaluran perencanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat, dan pembangunan yang direncanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Pola perencanaan ini bersifat partisipatif guna memadukan proses perencanaan masyarakat dengan Pemkab," terang Wisnu Wijaya.

Dia mengakui, dalam forum ini tidak semua rencana kegiatan bisa didanai karena tergantung besaran dan pagu dalam APBD. Namun tidak menutup kemung-

kinan kegiatan yang tidak didanai APBD bisa didanai melalui APBD Provinsi dan APBN. Forum RKPD ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang akan dipakai acuan dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2016.

Forum ini dibuka Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata dihadiri Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra, jajaran DPRD Gianyar, Sekkab Ida Bagus Gaga Adi Saputra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, pejabat SKPD, Camat, Perbekel/Lurah, para perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat serta keterwakilan perempuan.

Bupati Agung Bharata mengatakan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pihaknya mengharapkan, SKPD dalam menyusun Renja (rencana kerja) mensinergikan rencana masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dan ruang partisipasi warga tetap terjaga. "Prinsipnya, dari, oleh dan untuk masyarakat bisa dilaksanakan optimal sehingga prioritas pembangunan RKPD 2016 bisa segera terwujud," terang Agung Bharata. **Isa**

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

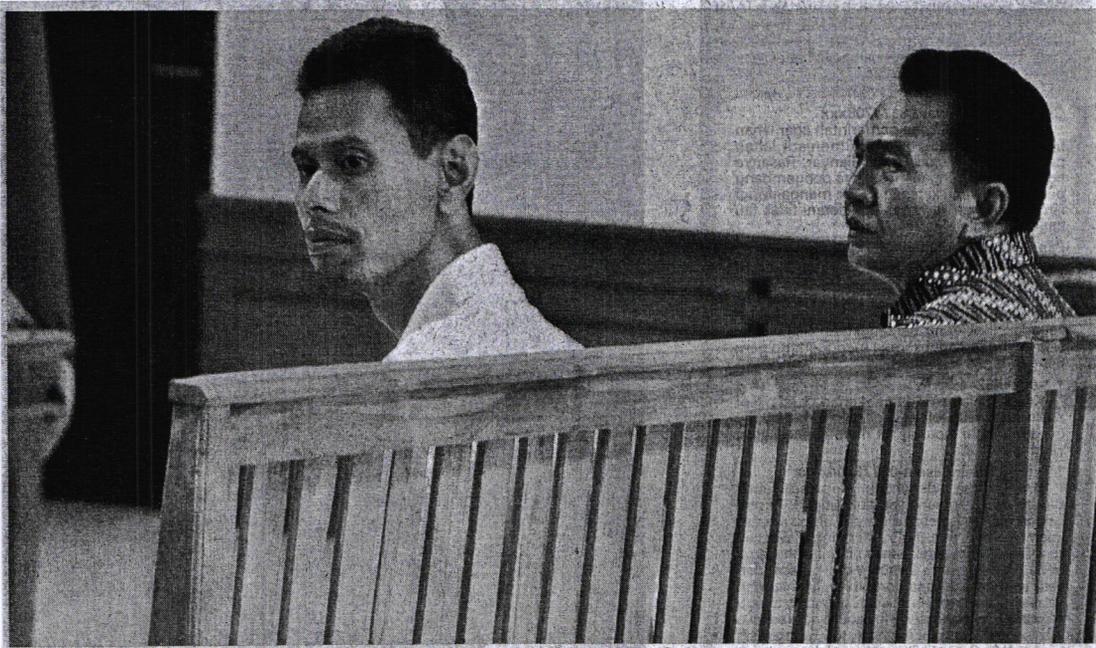
Hal : 6



Dugaan Korupsi Dana BOS SMPN 1 Nusa Penida

**Kedua Terdakwa Akui**

**Tak Membentuk Manajemen BOS**



TERDAKWA Kepala SMPN 1 Nusa Penida, I Nyoman Utama (kanan) dan Bendahara BOS, Ketur Darmaputra (kiri) jalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (24/3).

DENPASAR, NusaBali

Dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Nusa Penida kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipkor Denpasar pada, Selasa (24/3). Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan kedua terdakwa, yaitu Kepala SMPN 1 Nusa Penida, I Wayan Utama dan Bendahara BOS 2012, Ida Bagus Ketut Darma.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Early Setyorini, terdakwa Utama mengaku tidak pernah membentuk manajemen BOS untuk mengelola dana bantuan untuk sekolahnya ini. Dengan tidak adanya manajemen BOS, otomatis RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) juga disusun oleh bendahara dan kepala sekolah. "Seharusnya sesuai petunjuk teknis harus ada manajemen BOS yang berisi Kepala Sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah," terangnya.

Sutama beralasan manajemen BOS memang tidak melibatkan guru dan komite sekolah, karena pengalaman sebelumnya yang bekerja dan menangani dana BOS ini hanya kepala sekolah dan bendahara saja. "Di tahun sebelumnya saya melibatkan guru dan komite sekolah. Tapi tidak ada yang bekerja. Karena semua dilakukan kepala sekolah dan bendahara," ujarnya saat dicecar majelis hakim soal manajemen BOS yang tidak pernah dibentuk sesuai aturan yang ada.

Kepala SMPN 1 Nusa Penida yang sudah menjabat sejak



Sambungan

2009 ini juga mengaku sempat menggunakan dana BOS di luar rencana kegiatan. Salah satunya digunakan untuk membeli bangku sekolah pada tahun 2012 dan 2013. "Di tahun 2012 saya gunakan untuk membeli 43 bangku seharga Rp 43 juta dan tahun 2013 saya gunakan untuk membeli bangku seban-

yak 25 dengan harga Rp 25 juta," bebernya.

Penggunaan dana BOS di luar ketentuan ini sendiri dilakukan karena kebutuhan sekolahnya dan bukan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Hal yang sama juga dikatakan Bendahara BOS 2012, IB Ketut Darma. Ia mengatakan ditunjuk

sebagai bendahara BOS pada April 2011 melalui SK Kepala Sekolah.

Pada 2011, ia hanya menjalankan rencana kegiatan yang sudah disusun oleh bendahara sebelumnya. Sementara pada 2012, Darma mengaku ikut terlibat mulai membuat rencana kegiatan hingga membuat laporan pertanggung jawaban.

"Laporan pertanggung jawaban terakhir saya buat setelah saya dijadikan tersangka," papar pria bertubuh kurus ini. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa, sidang akan kembali dilanjutkan pekan mendatang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). rez

hal. 2

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 5



### Eks Kadisbud Bali Menunggu Dieksekusi ✓

## PN Denpasar Kirim Salinan Putusan ke Kejati

DENPASAR, NusaBali  
Pengadilan Negeri (PN) Denpasar akhirnya menyerahkan petikan putusan kasus korupsi pengadaan sound system dan lighting di Taman Budaya Art Centre Denpasar yang menjatuhkan hukuman kepada mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Bali, I Ketut Suastika selama 14 bulan penjara dan mantan Kepala UPT Art Centre, I Ketut Mantara Gandhi 13 bulan penjara.

Hal ini ditegaskan oleh Humas PN Denpasar, Hasoloan Sianturi yang ditemui di ruangannya pada, Selasa (24/3). Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan salinan petikan putusan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. "Sudah kami serahkan tadi pagi (Selasa, red) ke Kejati Bali," jelasnya.

Setelah penyerahan ini, Kejati Bali yang akan melakukan eksekusi terhadap kedua terpidana. "Per hari ini putusan berarti sudah inchoat. Karena kedua pihak, yaitu terdakwa dan JPU sama-sama menerima putusan. Sekarang Kejati yang akan mengeksekusi," pungkas Hasoloan.

Meski PN Denpasar sudah menyatakan mengirimkan salinan putusan, namun Kejati Bali mengaku belum menerima salinan putusan sehingga belum bisa melakukan eksekusi. "Hingga petang ini kami belum menerima salinan putusan. Sehingga belum bisa dilakukan eksekusi," ujar Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan yang dihubungi via telpon.

Seperti diketahui sebelumnya, Suastika divonis bersalah sesuai pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, Suastika divonis pidana penjara 14 bulan dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.

Sementara mantan Kepala UPT Art Centre, Mantara Gandhi juga divonis bersalah sesuai pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya ia dijatuhkan pidana penjara 13 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. **rez**



## Kejari Bidik Dua SKPD di Pemkot Denpasar dan Badung

DENPASAR, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Denpasar diam-diam membidik dua kasus korupsi besar di Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. Bahkan, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Hal ini ditegaskan Kejari Denpasar, Imanuel Zebua yang ditemui pada, Selasa (24/3).

Ia mengatakan saat ini beberapa penyidik Kejari Denpasar sedang mendalami indikasi korupsi yang dilakukan dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemkot Denpasar dan satu SKPD di Pemkab Badung. "Ada dua SKPD di Pemkot Denpasar dan satu di Pemkab Badung yang terindikasi korupsi," bebernya tanpa mau menyebut SKPD yang dimaksud.

Mantan Kajari Papua ini mengatakan saat ini proses penyelidikan masih tahap pengumpulan data (Puldata). Namun ia mengaku sudah melakukan interview terhadap tiga orang di SKPD bersangkutan. Rencananya, pihaknya juga akan segera memanggil saksi lainnya untuk diperiksa di Kejari Denpasar.

"Kami rencanakan pemeriksaan terhadap saksi lainnya beberapa hari lagi," ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya tidak berani membuka SKPD yang dimaksud karena takut instansi bersangkutan akan menghilangkan barang bukti terkait korupsi ini. Apalagi, Zebua menyebutkan ada indikasi instansi bersangkutan tidak kooperatif selama menjalani penyelidikan.

"Dari pemeriksaan yang sudah



Immanuel Zebua

• NUSABALI/REZA

dilakukan, instansi bersangkutan memang tidak kooperatif karena alasan Hari Raya Nyepi. Makanya kami hati-hati dalam penanganan kasus ini," jelasnya. Penyelidikan kasus inipun memberi harapan baru bagi Kejari Denpasar yang belum pernah menyelesaikan penyelidikan kasus korupsi hingga tuntas, khususnya yang menyangkut Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. Terakhir, Kejari Denpasar sempat melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar. Namun kasus ini akhirnya dihentikan dengan alasan tidak ada barang bukti.

Menanggapi pernyataan ini, Zebua memastikan tidak akan ada yang lolos jika memang instansi bersangkutan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. "Saya pastikan tidak akan lolos kalau memang ada korupsi," tegas pria asal Pulau Nias, Sumatera Utara ini. rez

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 5



## PAD di Pengambengan Diduga Bocor

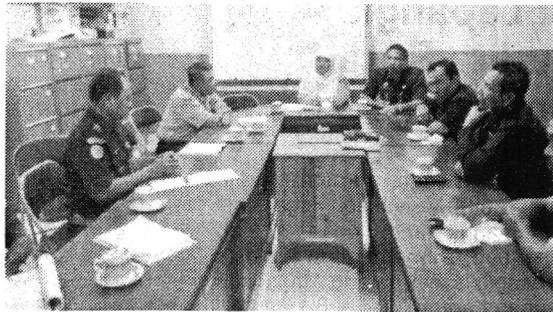
NEGARA, NusaBali

Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa bersama Wakil, Kade Darma Susila melakukan inspeksi mendadak (didak) ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Selasa (24/3). Mereka menduga terjadi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Pengambengan. Terjadinya kebocoran tidak terlepas dari sikap acuh pegawai PPN dengan TPI.

Dalam sidak tersebut, ditemukan aktivitas kapal selerek yang melakukan bongkaran atau penimbangan di belakang pabrik tanpa melalui dermaga PPN. Hanya ada beberapa kapal saja yang masuk melakukan penimbangan di TPI yang menjadi satu kesatuan dengan PPN tersebut. Pihak TPI menjelaskan, areal TPI kurang luas atau sudah overload. Selain itu, penampungan kapal di dermaga PPN juga kurang memadai.

"Ini sudah jelas dampak yang muncul, karena tidak adanya koordinasi. Sekarang tempat yang menjadi sumber PAD kita tidak diperhitungkan. Tidak ada hanya TPI, tempat cold storage dan bengkel perahu yang ada di kita tidak dihiraukan. Jangan semena-mena baru pegang izin pusat," kata Sugiasa saat bertemu dengan jajaran PPN Pengambengan.

Dikatakan, kebocoran yang terjadi akibat tidak sinkronnya PPN dengan TPI. Ketika per hari ada lima atau enam kapal dengan membawa ikan masing-masing 2 ton melakukan timbangan di



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

KETUA DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa dan Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Kade Darma Susila, saat melakukan pertemuan dengan pihak PPN Pengambengan, Selasa (24/3).

luar TPI, 2 persen hasil harga sesuai timbangan belasan ton yang semestinya masuk ke kas daerah menjadi hilang. "Itu kalau sehari. Bayangkan kalau sebulan, dan setahun. Sekarang tidak ada koordinasi, hasilnya seperti ini, sama saja bohong. Padahal ini satu kesatuan. Nanti kalau tetap saja alasan Pusat,

kita di sini bisa kok menghentikannya, kalau memang kita lihat malah merugikan" tambah Sugiasa.

Melihat potensi kebocoran PAD, Sugiasa minta PPN menjalin komunikasi dengan TPI maupun dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan Jembrana. "Nanti tata ruangnya, dampak lingkungan juga harus jelas. Kita minta TPI bisa diperluas, dan semua kapal masuk ke dermaga," tandas Sugiasa. Politisi PDIP itu juga menyinggung masalah lingkungan, karena dari pengurangan laut yang dilakukan tahun lalu berdampak pada abrasi semakin parah.

Pihaknya juga mendesak SKPD terkait di Jembrana segera mencari solusi sehingga tidak bergerak setelah kejadian. Sementara Kepala PPN Pengambengan, Suprpto, mengaku tidak tahu secara pasti dari awal hingga dilakukannya pengembangan. Pihaknya sepakat untuk selanjutnya melakukan koordinasi lebih intensif. Begitu juga dengan sarana penunjang perluasan TPI yang disadari memang perlu lebih diperhatikan. **od**

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 7



# Dampak Rupiah Melemah Realisasi Pembangunan Fisik Terancam

**Banyak proyek fisik di Karangasem tahun 2014 lalu mangkrak, penyebabnya mulai dari gagal tender, gagal pengerjaan hingga ditinggal kabur rekanan.**

AMLAPURA, NusaBali

Melemahnya rupiah hingga menyentuh Rp 13.075, dikhawatirkan berimbas pada pembangunan di Karangasem karena menyebabkan proyek-proyek fisik yang merupakan realisasi APBD 2015, terancam molor. Sebab, harga-harga barang melambung tinggi. Terutama pengadaan

material besi dan semen. Apalagi pada realisasi APBD 2014 lalu, puluhan proyek bernilai miliaran rupiah diketahui juga mangkrak.

Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta dihubungi di Amlapura, Selasa (24/3) mengakui ada

kekhawatiran banyak proyek di tahun 2015 terhambat pelaksanaannya. mengingat kenaikan harga material mulai naik, karena melemahnya rupiah. Kegagalan tahun 2014, jadi acuan, agar tidak terulang kembali di tahun 2015.

"Memang harga-harga mulai naik seperti material besi. Tetapi harga semen masih stabil, mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di tahun 2015, atas melemahnya rupiah," harap Sedana Merta.

Disinggung besaran inflasi di Karangasem Sedana Merta tidak memiliki data. Alasannya, inflasi

di Karangasem tidak terhitung. "Inflasi Karangasem mengikuti inflasi Bali," katanya.

Bappeda Karangasem sendiri memiliki 276 kegiatan berbiaya Rp 3,91 miliar. Berbeda dengan Dinas PU Karangasem memiliki 201 kegiatan berbiaya Rp 62,004 miliar, Dinas Budaya dan Pariwisata memiliki 86 kegiatan biayanya Rp 1,4 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) I Nyoman Sutirtayasa, mengaku tetap optimis, realisasi proyek fisik berlangsung sesuai rencana.

Sutirtayasa optimis, seluruh agenda pembangunan fisik bisa terlaksana, dengan lancar, walau puluhan proyek fisik tahun 2014, terbengkalai ditinggal rekanan. "Ya, mudah-mudahan kasus tahun 2014, tidak terulang kembali. Beberapa tender di tahun 2015 telah tuntas, tinggal menunggu tandatangan kontrak," kata Sutir-



Sambungan

tayasa dihubungi terpisah.

Dinas PU tercatat paling banyak menyedot anggaran untuk pembangunan fisik. Di antaranya peningkatan kualitas jalan di Banjar Waringin-Desa Pempatan (Kecamatan Rendang) Rp 3,65 miliar, pembangunan jembatan dan tiga ruas jalan Kelurahan Subagan menuju Banjar Asak (Kecamatan Karangasem) Rp 965 juta, normalisasi saluran irigasi di Kecamatan Karangasem Rp 485 juta, rehab embung di jaba Pura Pasar Agung, Desa Sebudi, kecamatan Selat Rp 99,25 juta, penyelamatan mata air di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem Rp 91 juta, pengamanan pantai di Kecamatan Karangasem Rp 500 juta, normalisasi saluran Sungai Krekuk di Kecamatan Karangasem Rp 150 juta, perbaikan saluran irigasi di 7 kecamatan senilai Rp 200 juta dan sebagainya.

Wakil Ketua DPRD Karan-

gasem Ida Bagus Adnyana mengingatkan, agar lebih profesional dalam hal mengerjakan proyek fisik, dengan harapan agar beragam kasus di tahun 2014 tidak terulang kembali. "Buktinya banyak proyek fisik di tahun 2014 mangkrak, mulai dari gagal tender, gagal pengerjaan ditinggal rekanan, dan sebagainya. Kalau rekanan tidak mampu, tidak memiliki latar belakang kemampuan mengambil pekerjaan tertentu, ya tendernya jangan dimenangkan," pinta IB Adnyana.

Misalnya salah satu proyek di Kecamatan Kubu, menyangkut pembangunan jalan menggunakan beton. "Jelas-jelas rekanan tidak memiliki dukungan pabrik beton, justru menang tender. Kenyataannya realisasinya hanya 30 persen, rekanan kabur. Jadinya masyarakat yang rugi, dan perencanaan juga rugi, salah salah nanti jadi temuan BPK," tambahnya. **k16**

hal.2

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 8



## RS Indera Akan Jadi RS Mata Bali Mandara

★ Disiapkan Rp 150 M untuk RS  
Rujukan Indonesia Timur

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan pemberian nama Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara tidak terkait dengan urusan politik.

"Dulu memang yang mencetuskan nama Mandara itu pertama saya, karena dulu memang wajib bagi calon gubernur untuk membuat visinya kemudian dijabarkan dalam misi dan program. Tetapi kemudian telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan diperdakan sehingga telah disepakati oleh semua pihak," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda penetapan Raperda Organisasi Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (24/3).

Oleh karena itu, ucap dia, terkait dengan pemberian nama RS Khusus Bali Mandara yang sebelumnya bernama RS Indera, tidak ada unsur politik-politikan karena sudah menjadi visi bersama masyarakat Bali.

"Jadi tidak boleh satu orang mengklaim dia punya. Saya pun tidak boleh, karena sudah menjadi milik semua yang ada di Bali," tegasnya.

Pastika mengatakan pe-

milihan nama RS Khusus Mata Bali Mandara tersebut juga setelah melalui proses perundingan dengan berbagai pihak. "Mandara itu artinya agung, besar. Kita ingin Bali itu tidak kecil, supaya pengaruhnya besar," ucapnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, penggantian nama RS Indera menjadi RS Khusus Mata Bali Mandara karena mengacu pada UU tentang Rumah Sakit karena harus spesifik disebutkan kekhususan nama dari rumah sakit.

Pihaknya juga menginginkan RS tersebut dapat menjadi tipe A yang menjadi RS rujukan bagi kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, RS tersebut juga diperluas hingga ke gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang berada di sebelah timurnya di Jalan Angsoka kawasan Kreneng, Denpasar.

"Targetnya RS itu selesai tahun depan dengan anggaran perluasannya dialokasikan Rp 150 miliar," ujar Pastika sembari menyebutkan selain disiapkan gedung, juga tengah dipersiapkan dokter, peralatan, sistemnya menjadi RS tipe A tersebut. **ant**

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 2